SEMINAR

PENDIDIKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

JAKARTA CONVENTION CENTER, 3 JUNI 2005

PERAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM *DECADE OF EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT* (DESD)

OLEH

HOETOMO, MPA

DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

KOMITE NASIONAL INDONESIA UNTUK UNESCO

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

PERAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM *DECADE OF EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT* (DESD)[1]

Oleh: Hoetomo, MPA[2]

I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang yang masih memerlukan sumber daya alam dalam melakukan pembangunannya. Akan tetapi, kondisi lingkungan termasuk sumber daya alam (SDA)-nya pada saat ini telah mencapai tingkat yang memprihatinkan dengan kecenderungan kualitasnya terus menurun. Lingkungan hidup di Indonesia masih merupakan masalah yang krusial, hal ini dapat kita saksikan dalam perilaku masyarakat sehari-hari, kegiatan industri dan kegiatan pembangunan lainnya yang menghasilkan sampah, limbah cair, dan emisi terhadap lingkungan. Selain itu, dalam kegiatan pembangunan juga sering terjadi pemanfaatan SDA yang cenderung bersifat *over*-eksploitatif dan hanya menguntungkan bagi beberapa kelompok masyarakat tertentu saja. Hal tersebut dapat terjadi antara lain karena belum terdapatnya kesempatan yang sama untuk akses terhadap SDA yang ada bagi setiap orang, serta masih belum meratanya tingkat kualitas sumber daya manusia tentang pengetahuan, sikap, serta perilaku untuk penyelamatan, dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.

Kemorosotan kualitas dan kuantitas SDA di Indonesia banyak diakibatkan oleh adanya interaksi/aktivitas dan peningkatan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan industri yang terus meningkat baik dari kalangan masyarakat dunia, regional, nasional, maupun daerah terhadap SDA yang pada akhirnya menimbulkan perilaku masyarakat yang eksploitatif terhadap kebutuhan akan SDA yang ada.

Kondisi yang terjadi seperti tersebut di atas merupakan persoalan penting

---

[1] Disampaikan secara tertulis dalam Seminar "PENDIDIKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN" diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen Pendidikan Nasional, dan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO di Jakarta, tanggal 3 Juni 2005.

[2] Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Kebijakan dan Kelembagaan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup.

yang harus diselesaikan, dan bila hal ini terjadi secara terus-menerus maka masa depan lingkungan hidup di Indonesia akan menjadi rusak dan pada akhirnya akan berdampak juga pada kehidupan manusia. Menyikapi berbagai persoalan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup yang juga mempunyai peran dan tanggung jawab untuk melakukan pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup, pada tanggal 19 Februari 2004, bersama-sama dengan Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, dan Departemen Dalam Negeri telah menetapkan Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup yang dijadikan dasar/arahan bagi seluruh *stakeholder*/para pihak yang terkait dalam pelaksanaan dan pengembangan pendidikan lingkungan hidup di Indonesia. Pendidikan lingkungan hidup dapat merupakan salah satu alternatif solusi yang efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat terwujud dengan baik. Pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di Indonesia selama ini masih belum memberikan pengaruh positif terhadap kesadaran dan perilaku masyarakat dalam melakukan tindakan yang menguntungkan atau berpihak bagi lingkungan dan masyarakat.

Menyikapi berbagai permasalahan tersebut diatas perlu langkah yang strategis untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Kebijakan umum pendidikan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup bersama-sama dengan Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Agama terdiri dari hal-hal sebagai berikut.

1) Kelembagaan pendidikan lingkungan hidup menjadi wadah/sarana menciptakan perubahan perilaku manusia yang berbudaya lingkungan;
2) Sumber daya manusia pendidikan lingkungan hidup yang berkualitas dan berbudaya lingkungan;
3) Sarana dan prasarana pendidikan lingkungan hidup sesuai dengan kebutuhan;
4) Pengalokasian dan pemanfaatan anggaran pendidikan lingkungan hidup yang efisien dan efektif;

5) Materi pendidikan lingkungan hidup yang berwawasan pembangunan berkelanjutan, komprehensif dan aplikatif;
6) Informasi yang berkualitas dan mudah diakses sebagai dasar komunikasi yang efektif;
7) Keterlibatan dan ketersediaan ruang bagi peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan lingkungan hidup;
8) Metode pendidikan lingkungan hidup berbasis kompetensi.

Strategi pelaksanaan kebijakan pendidikan lingkungan hidup merupakan penjabaran kebijakan umum di atas. Strategi ini memberikan kerangka umum untuk mewujudkan cita-cita pengembangan pendidikan lingkungan hidup di Indonesia, sehingga dapat diciptakan manusia Indonesia yang berpengetahuan, berketerampilan, bersikap dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap nasib lingkungan hidup kita serta dapat turut bertanggung jawab aktif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup di sekitar kita.

Strategi-strategi ini saling berkait satu dengan lainnya, namun tidak berarti strategi-strategi tersebut harus menjadi satu kesatuan yang berturutan, sehingga dalam pelaksanaan strategi tersebut tidak perlu dilaksanakan secara seri berdasarkan urutan strategi yang ada. Strategi Pelaksanaan ini meliputi hal-hal sebagai berikut.

1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pendidikan lingkungan hidup sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan dalam pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup;
2) Meningkatkan kualitas dan kemampuan (kompetensi) sumber daya manusia pendidikan lingkungan hidup, baik pelaku maupun kelompok sasaran pendidikan lingkungan hidup sedini mungkin melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif;
3) Mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan lingkungan hidup yang dapat mendukung terciptanya proses pembelajaran yang efisien dan efektif;
4) Meningkatkan dan memanfaatkan anggaran pendidikan lingkungan hidup dan mendorong partisipasi publik serta meningkatkan kerja sama regional, internasional untuk penggalangan pendanaan pendidikan lingkungan hidup;

5) Menyiapkan dan menyediakan materi pendidikan lingkungan hidup yang berbasis kearifan tradisional dan isu lokal, modern serta global sesuai dengan kelompok sasaran pendidikan lingkungan hidup serta mengintegrasikan materi pendidikan lingkungan hidup ke dalam kurikulum lembaga pendidikan format;
6) Meningkatkan informasi yang berkualitas dan mudah diakses dengan mendorong pemanfaatan teknologi;
7) Mendorong ketersediaan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan lingkungan hidup;
8) Mengembangkan metode pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup yang berbasis kompetensi dan partisipatif.

II. Implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup

Dalam pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup pada jalur pendidikan formal (pendidikan dasar, menengah, dan tinggi), nonformal (kursus, seminar, *wokshop*,dll), dan informal (saresehan, temu wicara, ceramah agama dll), lembaga pemerintah baik di pusat dan daerah dapat berperan sebagai fasilitator, sehingga sinergi pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup yang dilakukan antara pemerintah dan pihak terkait lainnya dapat terus dijaga dan ditingkatkan.

Seperti kita ketahui dalam kebijakan kurikulum nasional, pembelajaran materi pendidikan lingkungan hidup sebagai pengetahuan diajarkan di sekolah-sekolah melalui pola terintegrasi pada kegiatan kurikuler (mata pelajaran), sedangkan untuk pembentukan sikap dan perilaku kepada siswa sekolah dilakukan melalui kegiatan praktik dan/atau kegiatan ekstrakurikuler dengan berbagai cara antara lain: melakukan kegiatan 'Jumat Bersih' di lingkungan sekolah, kerja bakti membantu masyarakat sekitarnya, kerja sosial dan lain sebagainya. Pada sebagian besar sekolah yang sudah mempraktikkan pendidikan lingkungan hidup, kegiatan ekstrakurikuler ini pada umumnya baru dilakukan pada lingkungan internal sekolah saja sehingga siswa/warga sekolah masih

belum utuh memiliki pemahaman, persepsi dan perilaku bersih di mana hanya sebatas pada lingkungan sekolah saja, itupun bagi sekolah yang sudah mempraktikkan pendidikan lingkungan hidup dan memiliki kepedulian terhadap lingkungannya.

Namun demikian pada sisi lain, yaitu di lingkungan di luar sekolah atau di masyarakat sering terjadi praktik yang kurang mendukung bagi pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup karena adanya perilaku dan contoh yang berbeda dengan apa yang diperoleh dalam pendidikan lingkungan hidup, yaitu sikap dan perilaku beberapa anggota masyarakat yang kurang atau tidak peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup, kurang dan tidak adanya kontrol, tindakan atau sanksi hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut tentunya dapat berakibat kurang efektifnya maksud tujuan pendidikan lingkungan hidup yang dilakukan di sekolah-sekolah. Dalam hal pelajar/siswa mengalami dualisme nilai pembelajaran dari sumber yang berbeda, yaitu yang didapat dari sekolah dan lingkungan masyarakat sekitarnya, situasi ini memang tidak menguntungkan bagi upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan. Untuk itu, menjadi tugas semua pihak untuk tetap berusaha tiada henti menyampaikan penyadaran terhadap masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup.

III. Peran Pendidikan Lingkungan Hidup dalam *Decade of Education for Sustainable Development*

Salah satu rekomendasi penting dari hasil Konferensi PBB tentang Pembangunan yang Berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2002 yang berupa dokumen ***Millennium Development Goals*** (MDGs), adalah menekankan bahwa pendidikan merupakan unsur terpenting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu disikapi oleh setiap negara adalah sebagai berikut.

1) Memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan yang terdapat di dalam 'Deklarasi Millenium' untuk mewujudkan pendidikan dasar yang universal,

yang menjamin bahwa pada tahun 2015 anak-anak di manapun, laki-laki dan perempuan akan dapat menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh;

2) Menyediakan akses bagi semua anak-anak, terutama yang tinggal di daerah perdesaan dan yang hidup dalam kemiskinan, terutama perempuan untuk diberi kesempatan menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh;

3) Mendukung badan-badan penelitian dan pengembangan yang didanai oleh publik untuk terlibat dalam aliansi strategis untuk tujuan memperkuat penelitian dan pengembangan dalam mewujudkan teknologi-teknologi dan produk yang ramah lingkungan, sumber-sumber teknis dan pendanaan yang memadai, serta mendorong adanya alih dan penyebaran teknologi-teknologi tersebut;

4) Mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan ke dalam sistem pendidikan pada semua tingkat pendidikan sebagai upaya untuk memajukan pendidikan sebagai agen utama perubahan;

5) Memberikan kepada seluruh anggota masyarakat kesempatan yang luas untuk memperoleh pendidikan melalui pendidikan formal dan nonfomal untuk memajukan pembangunan berkelanjutan;

6) Mendukung program pendidikan sebagai prasyarat dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, termasuk tindakan segera pada semua tingkatan untuk:
   a. mengintegrasikan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengembangan kurikulum sekolah untuk menjamin akses bagi masyarakat perdesaan dan perkotaan, dan menyediakan bantuan bagi pembangunan suatu lingkungan,
   b. meningkatkan akses yang lebih besar terhadap program-program bagi pelajar, peneliti dan para profesional (insinyur, ekonom, dan lainnya) dari negara berkembang pada universitas dan lembaga penelitian di negara maju,
   c. melanjutkan pelaksanaan program kerja dari Komisi Pembangunan Berkelanjutan PBB di bidang pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, dan

d. merekomendasikan SMU PBB untuk mempertimbangkan penerimaan suatu dekade untuk pendidikan bagi pembangunan berkelanjutan, dimulai tahun 2005;

7) Menyediakan bantuan dan dukungan pendanaan bagi pendidikan, penelitian dan program kepedulian publik dan lembaga pengembangan di negara-negara berkembang dan negara dalam transisi ekonomi sebagai upaya untuk:
   a. mempertahankan infrastruktur dan program-program pendidikan, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, dan
   b. mempertimbangkan cara-cara untuk menghindari keterbatasan dana bagi banyak lembaga pendidikan tinggi, termasuk universitas di seluruh dunia, terutama di negara yang sedang berkembang dan negara dalam transisi ekonomi.

Prinsip-prinsip MDGs, yaitu konsep pembangunan yang mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi, sosial dan ekologi sebagai aspek yang saling terkait dalam setiap kegiatan pembangunan perlu untuk dilaksanakan bagi seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Di samping itu, MDGs juga mengamanatkan semua negara untuk mengintegrasikan perspektif pembangunan berkelanjutan ke dalam sistem pendidikan di semua jalur/jenjang pendidikan yang ada.

Pada bulan Mei 2003, Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa telah melaksanakan konferensi bagi para Menteri Lingkungan Hidup negara-negara Eropa, Kanada dan Amerika Serikat di Kiev, Ukraina yang salah satu rekomendasinya adalah menekankan adanya keharusan untuk perbaikan sistem pendidikan dan desain program pembelajaran bagi pembangunan berkelanjutan dengan maksud agar dapat meningkatkan pemahaman semua pihak/masyarakat dalam hal bagaimana mempromosikan dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Pada intinya beberapa butir prinsip kunci dalam konferensi Kiev dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1) Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan adalah isu multisektor yang membahas dimensi masalah ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial serta megharapkan adanya suatu pendekatan yang partisipatif dan holistik.

2) Pembelajaran pada setiap level/tingkatan harus terus diupayakan dan perlu menggunakan pemikiran dan refleksi yang kritis sebagai prasyarat untuk tindakan yang nyata bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
3) Pembangunan berkelanjutan perlu terus disampaikan kepada seluruh perancang pendidikan di semua tingkatan, termasuk kursus praktis dan pendidikan yang berjenjang.
4) Pendidikan adalah proses sepanjang masa yang dapat meliputi pendidikan formal, nonformal dan informal.
5) Tujuan akhir dari pembangunan berkelanjutan adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat melaksanakan perubahan yang positif dan berwawasan lingkungan. Untuk itu, diperlukan adanya proses orientasi dan pendekatan yang partisipatif.

Kelima butir prinsip kunci tersebut merupakan hasil yang sudah maksimal dari diskusi dan kesepakatan awal. Hal lain yang penting dari hasil diskusi tersebut menekankan perlunya membuka dan memberbaiki kembali orientasi pendidikan lingkungan hidup selama ini menuju pada pendidikan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Melihat beberapa perkembangan pendidikan lingkungan yang sudah dilakukan oleh beberapa negara termasuk Indonesia dan melihat dokumen MDGs hasil Konferensi Johannesburg tersebut, kita perlu mengevalusi pendidikan lingkungan hidup yang pernah kita laksanakan dan karena mulai tahun 2005 sampai tahun 2015 telah dicanangkan PBB sebagai tahun **'Dekade Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan'** (*Decade of Education for Sustainable Development*), kita semua perlu melihat kembali desain dan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup untuk dapat diselaraskan ke dalam konsep pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Sebagai pelaksanaan 'Dekade' telah ditetapkan UNESCO sebagai *lead agency* untuk mempromosikannya. Tema-tema penting yang perlu disosialisasikan dalam dekade pembangunan berkelanjutan tersebut meliputi berbagai hal seperti: keanekaragaman hayati, pengelolaan air tawar, konservasi dan perlindungan lingkungan, transformasi perdesaan, promosi kesehatan, produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, HAM, perdamaian dan pemahaman internasional, dan berbagai isu lintas penurunan tingkat kemiskinan dan kesetaraan jender. Seluruh negara anggota

PBB akan mengadopsi rekomendasi-rekomendasi tersebut dan akan mengintegrasikan pendidikan bagi pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan pendidikan mereka dan melaksanakannya pada semua satuan, jenis dan jenjang pendidikan yang ada.

Sesuai dengan visi, misi dan strategi yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian Lingkungan Hidup, peran pendidikan lingkungan hidup menjadi sangat penting terutama dalam implementasi kegiatan pembangunan yang berkelanjutan, dan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup tersebut harus dapat dilakukan oleh seluruh *stakeholders* yang terkait baik di pusat dan daerah. Tujuan akhir dari pendidikan lingkungan hidup ini adalah membantu mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa keuntungan atau manfaat yang dapat diperoleh dalam pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut.

1) Penyiapan kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan, pemahaman dan sikap terhadap pentingnya pelestarian lingkungan hidup dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan;
2) Dapat turut menyelesaikan masalah isu lingkungan global, nasional, dan lokal;
3) Dapat membantu penambahan pemahaman aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup sehingga menciptakan sikap penghematan terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan biaya pemulihan lingkungan;
4) Dapat membantu meningkatkan kesehatan/harapan hidup masyarakat yang lebih baik;
5) Dapat menunjang program pemerintah/masyarakat di bidang lingkungan hidup seperti program Proper, Prokasih, Gerakan Bersih Pantai dan Laut, Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program Langit Biru, Bangun Praja, Kendali B3, dan lain-lain.

Pendidikan di berbagai jenjang adalah kunci bagi pembangunan berkelanjutan. Mendidik masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan bukan

tetapi juga mempromosikan keseimbangan antara tujuan ekonomi, kebutuhan sosial dan tanggung jawab ekologis. Pendidikan harus membekali siswa dengan keterampilan, perspektif, nilai, dan pengetahuan agar dapat hidup secara berkelanjutan dalam masyarakatnya. Diperlukan konsep yang interdisipliner dan terintegrasi sebagai alat analisis dari berbagai disiplin ilmu agar program dan pelaksanaan pendidikan bagi pembangunan berkelanjutan dapat berhasil.[3]

Dalam konsep Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan ditetapkan 10 aspek yang menjadi *core issues*, yaitu:

1. Peningkatan informasi dan kesadaran,
2. Peningkatan pengetahuan,
3. Manajemen dan perlindungan lingkungan,
4. Perdamaian dan persamaan hak,
5. Peran masyarakat lokal dalam pembangunan,
6. Transformasi masyarakat,
7. Pertimbangan nilai budaya masyarakat,
8. Hal yang berhubungan dengan cross-cutting issue seperti masalah HAM, persamaan gender dan kepemerintahan yang baik,
9. Kesehatan, dan
10. Pendidikan lingkungan.

Guna menindaklanjuti kegiatan Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan Departemen Pendidikan Nasional dan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO berperan mendorong seluruh *stakeholders* yang terkait sehingga jiwa dan materi pendidikan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan dapat masuk ke dalam jalur pendidikan pada umumnya. Dekade Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan ini merupakan peluang bagi setiap negara, termasuk Indonesia, dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup selama ini dan mengembangkannya agar tujuan pendidikan dapat mencapai sasaran pembangunan yang berkelanjutan (*Education for Sustainable Development*).

[3] Dikutip dalam Laporan Sekretaris Jenderal PBB Koffi Annan tentang Agenda 21.

IV. Menuju Pendidikan Lingkungan Hidup yang Kontekstual dan Preparatoris terhadap Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pendidikan lingkungan hidup yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesadaran manusia terhadap pelestarian lingkungan hidup (dalam arti yang luas) pada dasarnya adalah untuk memperkuat keterpautan antara individu atau sekolompok manusia dengan lingkungan dan alam sekitarnya (SDA). Dengan kata lain bahwa pengembangan kesadaran lingkungan merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan perubahan sikap perilaku manusia dengan konteks lingkungannya yang meliputi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan baik meliputi dimensi ruang maupun waktu. Meminjam istilah Muchtar Buchori, pendidikan memiliki sifat antisipatoris atau preparatoris, di mana ada upaya untuk mempersiapkan sebuah generasi untuk menghadapi masa depan, sehingga pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan perlu pula dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan holistik. Dikaitkan dengan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, dan melihat kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam butir untuk mendorong adanya penyiapan dan pengembangan materi pendidikan, maka perlu ditekankan untuk memberikan masukan muatan yang terintegratif antara aspek baik ekonomi, sosial dan lingkungan hidup ke dalam materi pendidikan lingkungan hidup tersebut.

Terdapat kata kunci yang menjadi dasar dalam pendidikan lingkungan hidup yaitu 'kearifan' (*wisdom*). Untuk itu, tugas dari pendidikan lingkungan hidup dikaitkan dengan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan adalah untuk dapat melakukan transformasi kearifan lingkungan yang dikaitkan dengan aspek ekonomi, sosial dan ekologi dari generasi ke generasi melalui pendekatan yang holistik kontekstual (multiaspek), partisipatif dan preparatoris (antisipatoris). Pendidikan lingkungan hidup yang terkait dalam pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan harus mampu menajamkan materi pendidikan pada konteks ekonomi, sosial dan lingkungan di mana pembangunan tersebut akan dilaksanakan.

Bagi pelaku pendidikan lingkungan hidup, menjadi penting untuk menjaga agar proses yang dikembangkan harus holistik dan tidak *out of context*

apalagi *misdirection* yang menuju pada kekeliruan pedagodis yang serius. Pendidikan lingkungan hidup yang kontekstual dan preparatoris akan mengintegrasikan pengetahuan ekonomi, sosial dan lingkungan sehingga dapat menghasilkan kearifan lingkungan bagi sebuah generasi sekarang dan yang akan datang.

Pendidikan lingkungan hidup mungkin tidak memberikan kontribusi jangka pendek bagi gerakan lingkungan kontemporer, atau gerakan pendidikan yang mutakhir namun pendidikan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan akan memberikan dasar-dasar menuju kearifan lingkungan bagi generasi pada masa yang akan datang.

Dalam mengembangkan pendidikan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan diperlukan adanya pendalaman materi terutama terhadap konteks ekonomi, sosial dan lingkungan di mana sasaran pendidikan lingkungan hidup tersebut berada. Jika sasaran pendidikan lingkungan hidup adalah anak anak, maka pendalaman materi akan dunia dan lingkungan anak menjadi penting untuk dipertimbangkan. Apakah nilai-nilai dasar yang dianut anak anak, bagaimana relasi interpersonel di antara mereka, bagaimana dasar kehidupan mereka seperti *lifestyle*, tingkat ekonomi dan lingkungan alam sekitar mereka dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhinya, merupakan kajian yang baik sebagai persiapan menuju pengembangan pendidikan lingkungan hidup yang kontekstual terhadap pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain diperlukan pendalaman terhadap *historical timeline* serta *trend and change* dalam komunitas di mana anak anak, yang dimaknai ulang dengan pendapat dan cita cita dasar anak-anak tentang masa depannya, di mana hal tersebut merupakan persiapan menuju pendidikan lingkungan hidup yang menuju pendidikan untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.

V. Penutup

Pendidikan lingkungan hidup perlu dikembangkan menjadi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Kita percaya bahwa pendidikan lingkungan hidup yang dikembangkan ke dalam pendidikan untuk pembangunan

berkelanjutan dapat merupakan sarana efektif bagi pengembangan kepedulian, pemahaman nilai-nilai dan etika lingkungan sehingga tercipta kesadaran lingkungan hidup bagi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu, dalam kesempatan ini Kementerian Lingkungan Hidup berharap agar dalam Seminar "Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan" dapat diperoleh masukan-masukan maupun pendapat-pendapat dari seluruh komponen masyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi pelaksanaan dan pengembangan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan yang saat ini sedang kita galang bersama.

Kami juga mengharapkan agar para pihak terutama Departemen Pendidikan Nasional, pemerintah daerah, pusat studi lingkungan, pendidik dan tenaga kependidikan, swasta dan dunia usaha, media masa maupun pihak-pihak yang sangat peduli terhadap pelestarian lingkungan, senantiasa dapat membantu terselenggaranya pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Semoga seminar ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dunia pendidikan khususnya pendidikan lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.